

**PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI TENGAH
PANDEMI SEBUAH STUDI KASUS DI JAWA BARAT**

Herold Moody Manalu

Universitas Advent Indonesia

moody.manalu@unai.edu

***ABSTRACT.** The Covid-19 pandemic has had various impacts on society in Indonesia. One of the impacts is a decrease in people's income which causes people not to carry out their responsibilities in paying taxes. One tax that has great potential for regional income is motor vehicle tax. This research aims to determine motor vehicle tax revenue in West Java Province before and during the Covid-19 pandemic. This research uses motor vehicle tax revenue data provided by the West Java Province Regional Revenue Agency for 2018-2022. The data used in this research consists of motor vehicle tax revenue data for the 24 months before Covid-19 and motor vehicle tax revenue for the 24 months during the Covid-19 period. Data analysis and data testing used the normality test, independent sample t test and t difference test. The comparison results of several regions in West Java show mixed results and the research results show that motor vehicle tax revenue before Covid-19 in West Java had a higher nominal value than motor vehicle tax revenue during the Covid-19 period, and the research results show that different tests carried out show that Covid-19 does not affect motor vehicle tax revenues in West Java province.*

***Keywords:** Motor Vehicle; Tax Revenue*

ABSTRAK. Pandemi Covid-19 membawa berbagai dampak terhadap masyarakat di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah menurunnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Salah satu pajak yang berpotensi besar dalam penerimaan daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor pada provinsi Jawa Barat sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah data dari 24 bulan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum Covid-19 dan 24 bulan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama Covid-19. Analisis data dan pengujian data menggunakan uji normalitas, uji independent sample t test dan uji beda t. Hasil perbandingan beberapa daerah di Jawa Barat menunjukkan hasil yang beragam dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum Covid-19 pada Jawa Barat lebih tinggi nominalnya daripada penerimaan pajak kendaraan bermotor selama Covid-19, dan hasil dari uji beda t yang dilakukan menunjukkan bahwa Covid-19 tidak memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi Jawa Barat.

Kata kunci: Penerimaan Pajak; Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini pertama kali terdeteksi yaitu di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei di China tengah pada Desember 2019. Infeksi virus Corona atau Covid-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Penularan Virus Covid-19 terjadi sangat cepat sehingga membuat WHO (*World Health Organization*) menetapkan virus Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (Nurhalimah, 2020).

Terjadinya pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk yang terjadi di Indonesia. salah satu sektor yang mengalami dampak buruk akibat Covid-19 adalah sektor ekonomi dan secara langsung berdampak juga terhadap penerimaan Negara. Salah satu dampak Covid-19 yaitu yang berpengaruh terhadap pendapatan atau anggaran yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, dimana PKB merupakan sumber anggaran terbesar yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan dana atau pendapatan anggaran suatu provinsi atau daerah (Indrawati & Katman, 2021).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang sangat memiliki potensi. Dalam hal ini Badan

Pendapatan Daerah memiliki kepentingan untuk selalu dapat memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat pesat di masing-masing daerah. Pemerintah daerah melihat suatu peluang yang berpotensi untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dijadikan objek Pajak Kendaraan Bermotor (Khasanah et al., 2020). Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tentunya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Kresnanto, 2019).

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Kendaraan pada Provinsi Sulawesi Utara

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Utara
2018	322.627.072.314
2019	364.467.162.889
2020	324.243.394.161
2021	355.620.684.135
2022	408.264.090.886

Sumber: Sulut.bps.go.id

Berdasarkan contoh kasus yang saya ambil dari data penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Provinsi Sulawesi Utara didapati bahwa terdapat naik dan turun jumlah penerimaan PKB setiap tahunnya. Dari data jumlah Penerimaan Pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara didapati pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari 322.627.072.314 ke 364.467.162.889 pada 2019 sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 pada saat pandemi masuk ke Indonesia jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar 40.383.678.153 dan pada tahun berikutnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kembali mengalami kenaikan seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah dalam menaikkan kembali penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan contoh kasus yang diambil dengan melihat penerimaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi Sulawesi utara penulis akan meneliti penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan selama Covid-19 di

Provinsi Jawa Barat dengan membandingkan data bulanan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 24 bulan sebelum Covid-19 dan 24 bulan selama Covid-19 di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan Uji Beda t (*Paired Sample Test*).

Berdasarkan latar belakang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat sebelum pandemi Covid-19?; 2). Bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat selama pandemi Covid-19?; 3). Bagaimana perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor di beberapa daerah di Jawa Barat sebelum dan selama covid-19?; 4). Apakah Covid-19 mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat?

KAJIAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 atau yang dikenal dengan virus corona membawa dampak yang besar terhadap perekonomian. Sektor perpajakan pun terkena dampak dari pandemi covid-19 ini. Dengan adanya covid-19 menjadikan suatu faktor penghambat bagi wajib pajak dalam membayar kewajiban mereka salah satunya dalam membayar pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak kendaraan bermotor (Widiantari & Sulindawati, 2022).

Covid-19 menurut *World Health Organization* adalah suatu penyakit menular yang diakibatkan oleh adanya infeksi virus berjenis baru. Covid-19 merupakan penyakit yang muncul pertama kali di China, lebih tepatnya di Wuhan pada tahun 2019. Covid-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh *novel coronavirus* atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus Disease* tahun 2019.

Kasus Covid-19 pertama kali di Indonesia terjadi pada bulan Maret 2020, kasus itu terdeteksi setelah dua orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Depok. Penyebaran Covid-19 semakin meningkat dari waktu ke waktu dan tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan saja melainkan aspek ekonomi dan perpajakan juga menjadi terpengaruh dengan adanya Covid-19. Adanya Covid-19 menimbulkan masalah bagi wajib pajak kendaraan bermotor karena mereka memiliki masalah

perekonomian karena pekerjaan yang tidak menentu akibat pandemi (Hasna & Nurhayati, 2022).

Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan kepada Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi ataupun badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah ataupun penyelenggaraan pemerintahan daerah (Ramadhan, 2019).

Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam pajak daerah, dan merupakan pajak yang memiliki peranan dan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan suatu daerah. Oleh karena PKB merupakan pajak yang memiliki peranan yang besar maka perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan melalui adanya upaya-upaya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah (Juliantari & Sudiartana, 2021).

Ada beberapa penelitian yang menjelaskan pentingnya penerimaan pajak. Beberapa ahli telah mengkaji pengaruh pandemi Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan *outcome* yang berbeda-beda, tergantung wilayah dan metodologi yang digunakan.

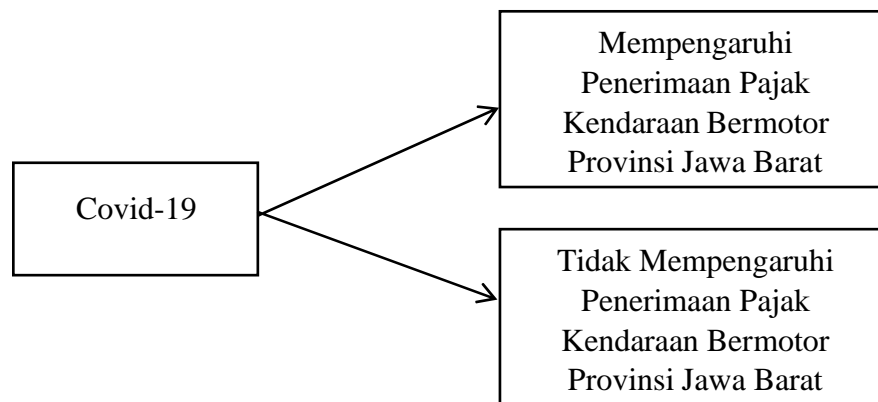
Penelitian yang dilakukan oleh Tumuli dkk. Di Provinsi Sulawesi Utara Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah tersebut sangat terpuak oleh pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa bencana non alam berdampak signifikan terhadap sektor perpajakan kendaraan bermotor.

Sunganda dan Nurhayati (2022) menelusuri pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Utara dan menemukan bahwa pandemi tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan yang dipungut. Berdasarkan data, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target yaitu mencapai 102,69% pada tahun 2020 dan 100,43% pada tahun 2021, meskipun terdapat sedikit

penurunan penerimaan dibandingkan tahun sebelum pandemi.

Ketiga, penelitian Liwongan Lie dkk. (2022) di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. Namun dari hasil evaluasi dan penyesuaian target pendapatan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah, pada akhir tahun pencapaian pendapatan hamper mencapai target yang telah ditetapkan.

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang tidak merata terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di seluruh daerah. Di beberapa daerah, seperti Sulawesi Utara, penelitian menunjukkan adanya dampak besar pandemi ini terhadap penurunan pendapatan. Mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menilai dan menyesuaikan target pendapatan akan menyeimbangi kondisi tersebut dan menjadi realisasi pajak sesuai target. Sebaliknya pada masa pandemi, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada UPT PPD Medan Utara, mengingat penerimaan pajak masih sesuai target, meski sedikit menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan adaptif dalam menjaga stabilitas koleksi di bawah krisis.



Gambar 1

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka fokus dari penelitian ini adalah menganalisa dan membandingkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum Covid-19, apakah terdapat atau tidaknya perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan selama pandemi Covid-19 dengan menggunakan uji beda t.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat penulis membuat

hipotesis sebagai berikut:

1. Pada periode sebelum pandemi Covid-19, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat stagnan atau dalam tren meningkat.
2. Pada masa waspada Covid-19, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat mengalami penurunan.
3. Perbedaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah di Jawa Barat pada masa pandemi.
4. Pandemi Covid-19 memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menganalisis laporan penerimaan pajak sebelum dan sesudah Covid-19. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2018-2022. Pemilihan tahun 2018-2022 mengingat pandemi Covid-19 yang dimulai sejak Maret tahun 2020 dan mengambil data bulanan penerimaan pajak kendaraan bermotor mulai dari bulan Maret 2020 hingga bulan Februari 2022, sehingga untuk perbandingannya digunakan data bulanan yaitu bulan Maret 2018 sampai bulan Februari 2020. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data merupakan data sekunder yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data penelitian diperoleh dari hasil data sekunder yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. Data penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum Covid-19 di Jawa Barat adalah data penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 24 bulan yaitu dari bulan Maret tahun 2018 hingga bulan Februari tahun 2020.

Seluruh penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat sebelum Covid-19 atau selama 24 bulan sebelum Covid-19 yaitu dari bulan Maret 2018 hingga bulan Februari 2020 memiliki total penerimaan sebanyak Rp. 15.880.123.032.395.

Tabel 1 Descriptive Statistics Sebelum Covid-19
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Covid-19	24	437.278.576.650,00	856.209.562.250,00	661.671.793.016,4583	98.401.520.256,28975
Valid N (listwise)	24				

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Hasil uji deskriptif penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum Covid-19, menunjukkan bahwa nilai minimum atau penerimaan pajak kendaraan bermotor minimum yaitu sebesar Rp. 437.278.576.650 yang diterima pada bulan Juni 2018. Sedangkan nilai maximum penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 856.209.562.250 yang diterima pada bulan Desember 2019.

Tabel 2 Descriptive Statistics Selama Covid-19
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Selama Covid-19</i>	24	470.111.369.750,00	930.053.550.300,00	656.015.480.561,5417	96.313.998.375,97390
Valid N (listwise)	24				

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Hasil uji deskriptif penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum Covid-19, menunjukkan bahwa nilai minimum atau penerimaan pajak kendaraan bermotor minimum yaitu sebesar Rp. 437.278.576.650 yang diterima pada bulan Juni 2018. Sedangkan nilai maximum penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 930.053.550.300 yang diterima pada bulan Desember 2021. Ketentuan dari hasil Uji *Independent Sample T Test* adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi Covid-19.

2. Sebaliknya jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama Covid-19.

Wilayah-wilayah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum Covid-19 di Jawa Barat berjumlah 34 Wilayah penerimaan.

Tabel 3 Uji Normalitas PKB Jawa Barat Sebelum dan Selama Covid-19
Tests of Normality

	KOLMOGOROV-SMIRNOV ^A			SHAPIRO-WILK		
	Statistic	d f	Sig.	Statistic	df	SIG.
SEBELUM _COVID-19	,125	24	,200*	,985	24	,969
SELAMA COVID-19	,113	24	,200*	,945	24	,209

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 24 sampel yang dimana kurang dari 50 sampel sehingga menggunakan metode *Shapiro-Wilk*. Hasil dari perhitungan menggunakan *Shapiro-Wilk* didapati bahwa hasilnya adalah 0,209. Hasil ini menggambarkan bahwa data yang telah diuji normalitasnya berdistribusi normal karena hasilnya lebih besar dari 0,05.

Tabel 4 Statistics PKB Sebelum dan Selama Covid-19 Pada Provinsi Jawa Barat
Paired Sample Statistics

		MEAN	N	STD. DEVIATION	STD. ERROR MEAN
PA IR 1	Sebelum Covid-19	661671793016,45 84	24	98401520256,28975	20086126211,83774
	SELAMA COVID-19	656015480561,54 16	24	96313998375,97394	19660012592,36532

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Pada hasil dari output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel yaitu data sebelum Covid-19 dan selama Covid-19. Dari output ini didapati bahwa rata-rata penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum covid 19 yaitu sebesar Rp661.671.793.016 dan rata-rata selama Covid-19 yaitu

Rp656.015.480.562. Dari hasil kedua data ini didapati bahwa terdapat penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid-19, dari hasil rata-rata terdapat selisih sebesar Rp5.656.312.455.

Tabel 5 Correlations PKB Sebelum dan Selama Covid-19 pada Provinsi Jawa Barat

		N	CORRELATIO N	SIG.
PA IR 1	SEBELUM COVID-19 & SELAMA COVID-19	24	,503	,012

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Bagian output paired sample correlations memperlihatkan bahwa hasil korelasatau hubungan antara kedua data atau vaiabel yakni sebelum dan selama Covid-19. Dari hasil tersebut didapati bahwa hasil korelasi yaitu sebesar 0,012, dimana hasil ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat hubungan antara kedua data tersebut.

Tabel 6 Uji Beda T PKB Sebelum dan Selama Covid-19 pada Provinsi Jawa Barat

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	d f	Sig. (2- taile d)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pa Sebel ir um 1 Covi d 19 - Sela ma Covi d 19	5656312454, 91675	97055273366, 16469	19811324716, 11982	35326535191, 56493	46639160101, 39842	,2 86	2 3	,77 8

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Dari output ini akan didapati bahwa ada atau tidak adanya perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama Covid-19 pada provinsi Jawa Barat. Dasar pengambilan keputusan pada uji beda t ini adalah sebagai berikut.

1. Jika nilai Sig.(2-tailed) $< 0,05$, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama Covid-19.
2. Jika nilai Sig.(2-tailed) $> 0,05$, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama Covid-19.

Dari output diatas didapati bahwa hasil Sig. (2-tailed) sebesar 0,778. Menurut dasar pengambilan keputusan bahwa hasil $0,778 < 0,05$ yang berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama Covid-19 pada provinsi Jawa Barat. Sehingga dapat dikatakan dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat sebelum dan selama Covid-19, maka Covid-19 tidak mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka jawaban hipotesis menjadi:

1. Untuk menjawab hipotesis 1 tentang berapa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat sebelum pandemi Covid-19?
Sebelum adanya Covid-19, penerimaan pajak kendaraan bermotor stabil dengan rata-rata sebesar Rp661.671.793.016. Minimal Rp437.278.576.650 dan maksimal Rp856.209.562.250.
 2. Bagaimana kondisi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat pada masa pandemi Covid-19?
Penerimaan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid-19 terbilang lebih rendah yaitu rata-rata sebesar Rp656.015.480.562. Minimumnya sebesar Rp470.111.369.750, sedangkan maksimumnya mencapai Rp930.053.550.300.
 3. Bagaimana perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah di Jawa Barat sebelum dan selama pandemi Covid-19?
Secara keseluruhan, penerimaan pajak menunjukkan variabilitas regional
-

namun tetap konstan dalam nilai minimum dan maksimum sebelum pandemi. Disparitas antar wilayah masih terbuka dan menunjukkan fluktuasi dari rentang nilai minimal hingga maksimal selama pandemi.

4. Apakah Covid-19 Pengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Jabar?

Ujian beda t menghasilkan signifikansi (2-tailed) sebesar 0,778 ($>0,05$) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, ada lima kesimpulan yang diperoleh.

1. Stabilitas penerimaan pajak sebelum pandemi, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat menunjukkan stabilitas yang baik. Dari data tersebut terlihat bahwa pertumbuhannya tetap terjaga dengan baik. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum perpajakan yang baik dan pengawasan yang kuat oleh pemerintah daerah dalam memastikan penerimaan daerah tetap stabil. Implementasinya dapat ditingkatkan dengan meningkatkan strategi pemungutan pajak dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Ada sedikit penurunan selama pandemi. Meskipun penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih rendah selama pandemi, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya, yang mungkin disebabkan oleh kebijakan keringanan yang diambil selama masa sulit. Pemerintah dapat terus mendukung inisiatif yang mendorong kemudahan kepatuhan tanpa menambah beban wajib pajak.
3. Penerimaan pajak kendaraan bermotor bervariasi di seluruh daerah di Jawa Barat

sebelum dan selama pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lokal yang meliputi tingkat urbanisasi, tingkat pendapatan, dan kesiapan infrastruktur pajak memainkan peran penting. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan metode pemungutan pajak sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, terutama pada daerah yang kurang optimal dalam perolehan penerimaan pajak.

4. Pentingnya pengawasan dan kebijakan yang adaptif. Dengan pengawasan dan kebijakan yang efektif dan adaptif, sistem pemungutan pajak di Jawa Barat dapat bertahan meskipun menghadapi berbagai kendala akibat pandemi. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kerangka pengawasan dan memberikan langkah-langkah adaptif seperti menunda kebijakan pembayaran pajak atau memberikan pengecualian sementara bagi pelaku usaha yang sangat terdampak pandemi agar masyarakat dapat terus berkontribusi secara optimal.

Saran

Ada dua saran pada penelitian ini:

1. Terapkan kapasitas teknologi dan analisis data untuk meningkatkan pengawasan pajak. Miliki prosedur yang fleksibel, yang mencakup penjadwalan ulang atau diskon sementara untuk industri yang terdampak, yang akan memastikan kepatuhan.
2. Aturan pengumpulan pajak sesuai dengan situasi ekonomi setempat. Upayanya harus difokuskan pada yurisdiksi dengan tingkat pendapatan pajak yang rendah, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan sosial dan identifikasi bagi wajib pajak yang patuh.

DAFTAR PUSTAKA

Liwongan Lie, Agustin M., Sabijono, H., & Mintalangi, S. S. (2022). Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Evaluation Of Motor Vehicle Tax Receipts Before And During The Covid-19 Pandemic On North Sulawesi Province Or. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Hukum)*, 5(2), 459–468.

Hasna, N. D., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan

- Penggunaan Teknologi Sistem E-SAMSAT saat Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 36–42. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.605>
- Indrawati, R., & Katman, M. N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 26–41.
- Tumuli, K. F., Kawung, G. M. V., & Sumual, J. I. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 21(02), 121–129.
- Khasanah, L., Ariyanti, A. D., Lailia, A., & Saputri, D. S. (2020). *Prosedur Pelayanan Dan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 5 Tahun Badan Pendapatan Daerah (Upt Ppd Jombang)*. 1662048.
- Kresnanto, N. C. (2019). Model Pertumbuhan Sepeda Motor Berdasarkan Produk Dosmetik Regional Bruto (PRDB) Perkapita (Studi Kasus Pulau Jawa). *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 25(1), 107.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I Made., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Nurhalimah, N. (2020). Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdwon Untuk Mengatasi Wabah Covid-19. *SSRN*: <https://ssrn.com/abstract=3576405>
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81-87. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundandbisnis/article/view/2455/pdf1>
- Suganda, S., & Nurhayati, N. (2022). Analisis Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pengelolaan
-

Pajak Dan Retribusi Daerah (Bpprd) Upt Ppd Medan Utara. *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 48–53. <https://doi.org/10.46576/wjs.v2i1.2615>

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.

Widiantari, N., & Sulindawati, N. (2022). ... Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Persepsi Wajib Pajak Sesudah Diberlakukannya Insentif PKB Selama Pandemi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota *Jurnal Ilmiah Akuntansi* ..., 12(3), 647–654.